

**KEBIJAKAN INDONESIA MENDUKUNG PENCAPAIAN ISU PRIORITAS G20
DALAM MEMPERBAIKI EKONOMI PASCA COVID TAHUN 2022**

Oleh : Dipo Aditama

Pembimbing : Dr. Pazli, S.IP., M.A

email:dipoaditama2310@student.unri.ac.id

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax : 0761-63277

ABSTRACT

This research explains how Indonesia's policies support the achievement of G20 priority issues in improving the post-Covid economy in 2022 and the benefits obtained by Indonesia when it served as G20 Presidency. The COVID-19 pandemic has caused a significant decline in economic and health factors.

This research uses qualitative research methods, with data collection techniques through literature studies sourced from books, journals, articles, and official websites. This research also uses the perspective of liberalism, the level of group analysis, and also uses epistemic group theory to further strengthen this research.

The results of this study show various efforts made by Indonesia in overcoming the problems that arise due to COVID-19 by collaborating with parties who are competent in their fields to produce quality policies.

Keyword : G20, COVID-19, Policy, International Cooperation

PENDAHULUAN

Pada dasarnya kajian Ilmu Hubungan Internasional merupakan interaksi antar negara dalam dunia internasional. Interaksi adalah hubungan antar dua atau lebih aktor. Hadirnya globalisasi menciptakan suatu aktivitas lintas batas negara, termasuk interaksi dan kerja sama antar aktor hubungan internasional yang tidak terbatas serta tidak dapat dikendalikan sendiri oleh negara, seperti transaksi ekonomi global dan masalah lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin memperluas ruang lingkup kajian Hubungan Internasional. Kajiannya tidak hanya terbatas pada kajian politik, namun juga berkembang hingga isu ekonomi, politik, keamanan, konflik dan perdamaian. Penulis mengambil kajian konsentrasi ekonomi politik internasional yang berfokus pada kajian-kajian seperti permasalahan ekonomi yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang permasalahan ekonomi dan kebijakan yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19.

International Monetary Fund (IMF) memperkirakan ekonomi dunia akan kontraksi dan menegaskan bahwa pentingnya respon untuk membuat kebijakan yang tepat dalam menghadapinya. IMF memprediksi bahwa pertumbuhan perekonomian

dunia akan melambat dari 6,0 persen pada tahun 2021 menjadi 3,2 persen pada tahun 2022. Inflasi global diperkirakan akan meningkat dari 4,7 persen pada tahun 2021 menjadi 8,8 persen pada tahun 2022.¹

Selain menyebabkan krisis kesehatan pada banyak negara, COVID juga menjadi penyebab dari krisis ekonomi yang dirasakan oleh banyak negara. Pandemi ini menyebabkan pelemahan penawaran maupun permintaan dalam perekonomian negara. Dalam aspek penawaran, penerapan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat seperti melarang atau membatasi penerbangan antar negara maupun membatasi warga untuk melakukan perjalanan keluar daerah termasuk keluar negeri sebagai langkah untuk mengurangi dan memutuskan rantai penyebaran virus telah menyebabkan turunnya *supply* jasa pariwisata (dalam negeri maupun luar negeri). Sedangkan pada aspek permintaan masyarakat yang kebanyakan merupakan konsumen akan menahan diri untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam menyikapi kebijakan negara, sehingga menurunnya transaksi dan tingkat konsumsi masyarakat.² Untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi bertumbuh menjadi 5,3

¹ 'World Economic Outlook', *IMF* <<https://www.imf.org/en/Publications/WEO>> [accessed 25 May 2023].

² Raja Hardiansyah and Rona Tanjung, 'DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN KEPULAUAN RIAU', 8.1 (2021).

persen pada tahun 2022 dari 2,6 persen pada tahun 2021.³

Sadar dengan dampak negatif yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19, negara Indonesia beserta anggota-anggota G20 lainnya membuat komitmen untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang disebabkan oleh Covid-19. G20 adalah forum kerja sama multilateral yang terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa (EU). G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa.

Sebagai satu-satunya wakil negara ASEAN dalam keanggotaan G20 sekaligus menjabat sebagai Presidensi G20, Indonesia berperan untuk menjaga pertumbuhan domestik tetap tinggi dan stabil, menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan dan juga mewujudkan

balanced growth bagi negara maju dan berkembang.⁴

Presidensi G20 menjadi ajang pembuktian Indonesia bahwa di tengah pandemi. Dunia internasional tetap memiliki persepsi yang baik atas resiliensi ekonomi Indonesia terhadap krisis. Oleh karena itu, momentum presidensi yang hanya terjadi satu kali setiap generasi (kurang lebih dua puluh tahun sekali) harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberi nilai tambah bagi pemulihan Indonesia, baik dari sisi aktivitas ekonomi, maupun kepercayaan masyarakat domestik dan internasional.⁵ Indonesia akan terus memimpin usaha di dalam memastikan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui transformasi digital seperti akselerasi UMKM dalam ekosistem digital.

KERANGKA TEORI

Perspektif Liberalisme

Dalam penelitian ini penulis menggunakan perspektif Liberalisme. Di dalam studi hubungan internasional, liberalisme tidak hanya membentuk teori-teori tentang politik

³ 'East Asia and Pacific Sustaining Growth, Restraining Inflation, but Facing Risks Ahead', *World Bank* <<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2022/09/26/east-asia-and-pacific-sustaining-growth-restraining-inflation-but-facing-risks-ahead>> [accessed 25 May 2023].

⁴ Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan

Pengembangan, 'Analisis Pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia Pada Tahun 2023 Di Sektor Perdagangan', 2020.

⁵ sugianto Edi Cahyono, 'Presidensi G20 Pemulihan Ekonomi Dan Indonesia Maju | Sekretariat Negara' <https://www.setneg.go.id/baca/index/presidensi_g20_pemulihan_ekonomi_dan_indonesia_maju> [accessed 29 March 2023].

internasional tetapi secara tradisional juga menawarkan berbagai persepsi politik global (*global politics*). Salah satu tokoh Liberalis adalah Immanuel Kant (1724-1804) seorang filsuf abad kedelapanbelas asal Jerman.

Kontribusi monumental Kant untuk hubungan internasional terdapat di dalam karyanya *Towards Perpetual Peace*(1795), dimana di dalam karyanya ini Kant membuat argumen tentang bagaimana perdamaian dunia dapat dicapai. Ide dasar yang ditulis Kant ialah bahwasanya perdamaian dunia hanya mungkin dicapai ketika interaksi hubungan internasional meniru hubungan antar-individu di dalam masyarakat yang adil, dimana *rule of law* menjadi prinsip dasar berinteraksi. Sama seperti individu yang harus menghormati hak-hak orang lain untuk menentukan nasib sendiri, interaksi antar-negara seharusnya juga demikian; tidak ada negara yang diperbolehkan secara paksa dan sepihak ikut mencampuri konstitusi dan pemerintahan negara lain.⁶

Adam Smith (1723-1790) adalah salah satu tokoh liberalisme klasik, yang pemikirannya berkembang terutama dalam ranah ekonomi. Salah satu pemikiran dasar yang diwariskan dari tradisi pemikiran Smith ialah adanya saling ketergantungan antara masyarakat dengan masyarakat, antara negara dengan negara sebagai bagian dari

human nature. Bertolak dari sinilah berkembang dalam tradisi perspektif liberalisme suatu tesis; saling ketergantungan terutama pada sektor ekonomi mendorong negara untuk tetap menjaga kerjasama dan dengan begitu maka negara-negara akan mencegah diri dari situasi konfliktual yang mengarah ke situasi perang terbuka.

Level Analisis : Kelompok

Untuk menganalisis penelitian ini, peneliti membutuhkan sebuah tingkat analisis untuk dapat membantu dan mempermudah menguraikan permasalahan penelitian.

Di dalam Hubungan Internasional terdapat tingkat-tingkat analisa seperti tingkat analisa Individu, Kelompok, dan juga Negara-Bangsa. Tingkat analisa perilaku individu memiliki fokus penelaahan masalah tertuju pada bagaimana individu mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Tingkat analisa kelompok berfokus pada menganalisa perilaku kelompok atau organisasi yang tergolong dalam aktor Hubungan Internasional. Tingkat analisis negara-bangsa berfokus pada proses pengambilan keputusan luar negeri suatu negara-bangsa. Menurut Waltz, level analisis adalah faktor-faktor penjelas, sementara bagi Singer level analisis adalah target analisis di mana peneliti dapat memperoleh gambaran

⁶ *Teori Hubungan Internasional*, ed. by Vinsensio Dugis (Cakra Studi Global Strategis).

(*description*), penjelasan (*explanation*) dan perkiraan (*prediction*) yang akurat tentang perilaku negara.⁷

Teori Komunitas Epistemik

Komunitas epistemik muncul dan diperkenalkan oleh Jhon Ruggie dan kemudian disempurnakan oleh Peter M Haas. Komunitas epistemic dapat dipahami sebagai suatu jaringan yang beranggotakan profesional dengan keahlian dan kompetensi pada bidang tertentu dan memiliki klaim yang bersifat otoritatif terhadap pembuatan kebijakan yang sesuai dengan bidang keahlian yang mereka miliki.

Komunitas ini berbagi kepercayaan kausal, yang berasal dari analisis praktik mereka dalam memimpin atau berkontribusi pada serangkaian masalah tertentu dalam bidang mereka, yang kemudian menjadikan hal itu sebagai dasar untuk menjelaskan beberapa keterkaitan diantara tindakan kebijakan yang memungkinkan dan hasil yang diinginkan. Komunitas juga dapat berbagi cara pandang dan pengetahuan, berbagi pola dalam menentukan suatu alasan, memiliki gambaran suatu kebijakan dalam berbagi nilai, berbagi keyakinan kausal, menggunakan praktik diskursif bersama dan memiliki komitmen bersama dalam

menggunakan dan memproduksi suatu pengetahuan.

Posisi komunitas epistemik dapat dikatakan sebagai kelompok pembentuk ide dan norma, dan dengan sumber daya mereka yang berdasar pada argumen ilmiah menjadikan komunitas epistemik memiliki akses yang lebih mudah untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam suatu negara.

Pentingnya keterlibatan komunitas epistemik dalam rezim internasional inilah yang kemudian akan membawa mereka menjadi komunitas yang memiliki peran besar pada studi hubungan internasional. Mereka dapat menemukan solusi akan ketidakpastian yang ada diantara pemerintahan global. Mereka adalah pemegang kunci pengetahuan akan fenomena yang belum tentu dipahami oleh para pembuat kebijakan.⁸

Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis eksplanatif dengan tujuan untuk melihat langkah-langkah yang akan dibuat untuk memperbaiki perekonomian. Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka atau *library research*. Studi pustaka dilakukan dengan mencari dan menelusuri dokumen-dokumen yang berkaitan

⁷ Yessi Olivia, 'Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional', 3 (2013).

⁸ Emanuel Adler and Michael Faubert, 'Epistemic Communities of Practice', in *Conceptualizing International Practices*, ed.

by Alena Drieschova, Christian Bueger, and Ted Hopf, 1st edn (Cambridge University Press, 2022), pp. 47–76
<<https://doi.org/10.1017/9781009052504.003>>.

dengan objek penelitian melalui buku, jurnal, berita, artikel, sumber situs internet yang berkaitan dengan tulisan ini.

PEMBAHASAN

Pandemic Fund (Dana Pandemi)

Terjadinya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) pada tahun 2020 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga menyebabkan munculnya krisis multidimensional di dunia. Forum G20 yang terdiri dari 20 negara dan kawasan dengan perekonomian terbesar didunia, diharapkan bisa menjadi katalisator untuk melahirkan komitmen global dalam rangka mengatasi pandemi dan pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, sebagai reaksi terhadap dampak COVID-19 terhadap keuangan dan kesehatan global, dalam presidensinya, Indonesia mengusung tema “Recover Together, Recover Stronger” dengan tujuan mengajak seluruh negara untuk bahu membahu, saling mendukung untuk pulih bersama dan tumbuh lebih kuat serta berkelanjutan.

Presidensi G20 Indonesia mengusung 3 isu prioritas yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi. Salah satu hasil konkrit Presidensi G20 Indonesia jalur keuangan yang mendukung pencapaian tiga isu prioritas adalah *The Financial Intermediary fund for Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (FIF-PPR)* yang secara

resmi dinamakan Dana Pandemi (*The Pandemic Fund*).

Dana pandemi merupakan kemitraan kolaboratif antara negara donor, negara yang berhak menerima pendanaan (*co-investor*), yayasan (filantropi), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang dikelola oleh World Bank dengan World Health Organization (WHO) sebagai pimpinan teknis. Dana pandemi dilatarbelakangi karena adanya kesenjangan pembiayaan global dalam menangani pandemi dimana negara-negara berpenghasilan rendah-menengah tidak mampu menghasilkan vaksin, alat kesehatan, maupun diagnostik karena keterbatasan pembiayaan.

Dana pandemi diharapkan mampu menjadi instrumen penting untuk menguatkan sistem kesehatan baik pada level nasional, regional, dan global agar mampu mencegah, menyiapkan dan merespons kemungkinan terjadinya pandemi di masa mendatang dengan lebih baik khususnya bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Pada tahun 2020 saat Presidensi G20 Arab Saudi, terjadi pandemi COVID-19 yang mendorong diselenggarakannya *Extraordinary G20 Leader Summit* sekaligus meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan organisasi internasional untuk mengukur gap kesiapsiagaan terhadap penanganan pandemi serta memulai pembahasan solusi jangka panjang yang akan dilanjutkan pada Presidensi G20 Italia tahun 2021,

dibentuk *High Level Independent Panel (HLIP)* yang bertugas mengidentifikasi gaps pembiayaan *Pandemic Prevention, Preparedness, and Response (PPR)* dan menemukan solusi pembiayaan atas gaps tersebut.

Puncaknya, pada Presidensi G20 Indonesia, setelah dilakukan kajian kebutuhan pembiayaan PPR, kesenjangan, dan modalitas pembiayaan oleh Bank Dunia dan WHO, serta dilaksanakan 14 kali pertemuan donor dan secretariat interim, Governing board dan Dana Pandemi secara resmi diluncurkan dengan total kontribusi mencapai USD 1,6 miliar.⁹



Dalam awal operasionalnya, dana pandemi akan dijalankan bersama oleh kontributor, perwakilan penerima, dan mitra lainnya yang tergabung dalam *Governing board* (Dewan Pengatur) yang dipimpin oleh *Co-Chair*, Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan Indonesia) dan Daniel Ngajime (Menteri Kesehatan Rwanda).

Penerima manfaat dari Dana Pandemi utamanya adalah negara berpenghasilan rendah dan menengah yang berasal dari negara anggota

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan/ atau the *International Development Association (IDA)*. Sebagaimana diketahui IBRD dan IDA adalah bagian dari Group Bank Dunia yang secara khusus memberikan pinjaman panjang dengan tanpa bunga atau bunga rendah terhadap negara-negara yang tergolong miskin, berkembang, dan berpendapatan menengah dengan kelayakan kredit rendah sehingga kecil kemungkinan mendapatkan pendanaan dari lembaga lain.

Oleh karena itu, dana pandemi akan sangat berperan dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan negara-negara tersebut. Penggunaan dana akan difokuskan untuk mendukung penguatan fungsi PPR pada level nasional, regional, dan global termasuk didalamnya pembiayaan terkait pengawasan penyakit, pengembangan laboratorium, pengembangan dan pendistribusian pasokan medis esensial, harmonisasi peraturan, maupun peningkatan kapasitas tenaga kesehatan.

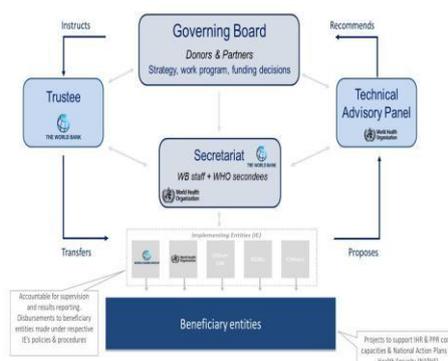
Total kontribusi yang terkumpul saat ini, berasal dari 25 pendonor (baik dari negara G20, non G20, dan filantropi) sebesar USD1,568 miliar. Indonesia sendiri juga telah menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi pada dana pandemi sebesar USD50 juta yang akan dibayarkan secara bertahap selama lima tahun.

⁹ 'Aksi Nyata Presidensi G20 Indonesia', *Warta Fiskal*, 4 (2022).

Tabel Daftar Kontributor Dana Pandemi

No	Negara/Filantropi	Jumlah Kontribusi
1	Australia	AUD 50 miliar
2	China	USD 50 miliar
3	Indonesia	USD 50 miliar
4	Jerman	EUR 69 miliar
5	India	USD 10 miliar
6	Italia	EUR 100 miliar
7	Republik Korea	USD 30 miliar
8	Uni Eropa	USD 450 miliar
9	Amerika Serikat	USD 450 miliar
10	Belanda	USD 10 miliar
11	Singapura	USD 10 miliar
12	Uni Emirat Arab	USD 20 miliar
13	Inggris	GBP 25 miliar

14	Jepang	USD 10 miliar
15	Spanyol	USD 15 miliar
16	Afrika Selatan	USD 5 miliar
17	Bill and Melinda Gates	USD 15 miliar
18	Welcome Trust	GBP 10 miliar
19	Rockefeller Foundation	USD 15 miliar



Tata Kelola Dana Pandemi

1. Dewan Pengatur adalah struktur tertinggi dan mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis, program kerja, dan keputusan pendanaan Dana Pandemi.
2. Panel Penasehat Teknis (*Technical Advisory Panel/TAP*), terdiri dari 20 ahli dengan berbagai keahlian teknis dan keuangan yang berkaitan dengan proyek atau kegiatan yang didukung oleh Dana Pandemi. TAP dipimpin oleh perwakilan WHO (Dr. Michael Ryan) sebagai

ketua dan Joy St. John yang ditunjuk oleh Guyana sebagai wakil ketua yang bertugas untuk membantu Dewan Pengatur mendapatkan informasi perkembangan terbaru tentang PPR pandemi, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait prioritas pendanaan dan keputusan alokasi pendanaan.

3. Sekretariat, bertempat di Bank Dunia dan sekarang dipimpin oleh Priya Basu (India) sebagai Kepala Eksekutif. Sekretariat menjalankan manajemen program dan layanan administrasi termasuk dukungan kepada Dewan Pengatur dalam menjalankan tanggung jawabnya.
4. Wali Amanat (*Trustee*), dijalankan oleh Bank Dunia sesuai dengan kebijakan dan prosedur Bank Dunia. Wali Amanat bertugas untuk menerima dana dari kontributor dan mentransfer sumber daya ke Entitas Pelaksana serta memberikan laporan berkala tentang status keuangan Dana Pandemi kepada Dewan Pengatur.
5. Entitas Pelaksana (*Implementing Entities*), bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaporan pelaksanaan proyek atau kegiatan yang menerima pendanaan dari Dana Pandemi. Entitas Pelaksana melakukan pembayaran kepada entitas penerima yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan prosedur Entitas Pelaksana masing-masing.

Struktur Keanggotaan Dana Pandemi

No	Jenis Keanggotaan	Konstituensi
1	9 kursi dengan hak suara dari negara kontributor	1) European Commission 2) Amerika Serikat 3) Itali 4) China 5) Jerman (ketua), Spanyol (alternate) 6) Indonesia (ketua), Uni Emirat Arab (alternate) 7) Jepang 8) Kanada (ketua), Norwegia (alternate) 9) Korea (ketua), Singapura (alternate), Selandia Baru (alternate)

2	1 kursi dengan hak suara dari konstituensi lembaga filantropi	Bill & Melinda Gates Foundation (ketua), Rockefeller Foundation (alternate), Wellcome Trust (alternate)
3	2 kursi dengan suara hak dari LSM	1) Global South 2) Global North
4	9 kursi dengan hak suara dari negara potensial penerima pembiayaan	1) Bangladesh 2) Pakistan 3) Rwanda 4) Senegal 5) Kongo 6) Guyana 7) Kepulauan Solomon 8) Mesir 9) Kazakhtan
5	Non Voting Members	1) India (Presidensi G20 2023) 2) Ketua dan Wakil Ketua TAP
6	Observer	1) Sekretariat 2) Wali Amanat

		3) Entitas Pelaksana 4) Negara atau Lembaga yang telah menyampaikan komitmen kontribusinya setelah tanggal 22 Agustus sebagai batas penyusunan struktur awal Dewan Pengatur (Prancis, Belanda, Arab Saudi, India, Spanyol, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat
--	--	---

Indonesia memiliki peran strategis pada Dana Pandemi. Selain sebagai pendiri, Indonesia juga merupakan pendonor, ketua, serta calon penerima manfaat pembiayaan. Memperhitungkan peran strategis pada pengelolaan Dana Pandemi yang saat ini telah dimiliki, diperlukan upaya, dukungan, dan konsistensi untuk dapat mempertahankan berbagai peran sentral tersebut sehingga Indonesia mampu mengoptimalkan kebermanfaatannya dari partisipasinya.

Energy Transition Mechanism Country Platform

Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan *Energy Transition Mechanism Country Platform*, sebuah bentuk koordinasi utama dan penggerak untuk mendorong transisi yang adil dan terjangkau di Indonesia untuk sektor energi.¹⁰

Pemerintah Indonesia telah menunjuk PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai ETM Country Platform Manager untuk mengembangkan kerangka kerja pembiayaan dan investasi untuk program ETM. PT SMI berkolaborasi dengan berbagai mitra institusi yang terdiri dari :

- Mitra Hibah (Bloomberg Philanthropies & ClimateWorks Foundation's Global Energy Transition Initiative, UK MENTARI, dan Global Energy Alliance for People and Planet)
- Mitra pembiayaan (ADB, World Bank, Islamic Development

Bank, Climate Investment Funds, HSBC, Standard Chartered, dan Japan Bank for International Cooperation).

- Mitra pengetahuan & teknis (United States Agency for International Development, Global Green Growth Institute, Climate Policy Initiative, United Nations Development Programme, Rocky Mountain Institute, dan Climate Bond Initiative).
- Serta mitra investasi (Indonesia Investment Authority).

Dewan pengelola *Climate Investment Fund*, salah satu pendanaan multilateral untuk aksi iklim negara-negara berkembang yang paling besar didunia, telah menyepakati dukungan pendanaan lunak sebesar USD 500 juta untuk Indonesia. Dana ini akan memobilisasi percepatan penghentian hingga 2 GW dari daftar pendek pembangkit listrik tenaga batu bara, membantu mengurangi sekitar 50 juta ton emisi karbon dioksida pada tahun 2030 dan 160 juta ton pada tahun 2040.

Kerjasama Indonesia dan Selandia Baru

Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru sepakat untuk memperpanjang kerja sama di bidang panas bumi, yang sudah berjalan sejak tahun 1970an. Pemerintah Selandia Baru, melalui *Ministry of Foreign Affairs and Trade* (MFAT),

¹⁰ 'Indonesia Luncurkan ETM Country Platform Untuk Mempercepat Transisi

Energi Yang Adil Dan Terjangkau' (presented at the Siaran Pers, Bali, 2022).

telah berkomitmen untuk memperpanjang kerja sama dibidang panas bumi untuk periode 2023-2028 dengan total rencana hibah sebesar 15,64 juta NZD atau Rp 147,8 Miliar. Program kerja sama ini diberi nama “Indonesia-Aoteroa New Zealand Geothermal Energy Programme (PINZ)”.

Tujuan dari program PINZ adalah untuk meningkatkan kontribusi energi panas bumi dalam mewujudkan target energi terbarukan Indonesia melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. Pendanaan ini akan diberikan selama lima tahun dan dibangun atas dasar hubungan baik yang sudah berlangsung lama antara Selandia Baru dan Indonesia dalam pengembangan panas bumi.

Komitmen sebesar NZ\$15,6 juta akan membantu Indonesia mencapai target energi terbarukan melalui penyediaan bantuan teknis dan peningkatan kapasitas di tiga bidang utama yaitu : kerangka peraturan, eksplorasi panas bumi, dan peningkatan keterampilan dan kapasitas teknis tenaga kerja.¹¹

Transisi Energi dan Urgensinya

Transisi energi mendukung kelestarian lingkungan hidup melalui pengurangan emisi bahan bakar fosil yang tentunya berimbas pada pengurangan dampak negatif perubahan iklim.

Transisi ke energi terbarukan dapat membantu meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada sumber energi asing (energi yang diimpor dari negara lain). Sumber energi seperti tenaga surya, angin dan air merupakan sumber energi dalam negeri yang potensi terkena geopolitik-nya sangat kecil.

Pembangunan energi terbarukan akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah di mana tenaga listrik dibangun. Dalam jangka panjang, biaya untuk energi terbarukan seharusnya menjadi lebih murah karena potensi resiko fluktuasi pasar (geopolitik) semakin kecil. Tentunya, hal ini juga dipengaruhi oleh kompetisi pasar tenaga listrik yang diharapkan lebih kompetitif.

Transformasi Digital

Berperan menjadi salah satu akselerator dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, transformasi digital terus digaungkan Pemerintah di berbagai sektor. Sejumlah Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional juga telah di *pass through* dengan memanfaatkan media digital, mulai dari pemanfaatan *cloud* melalui aplikasi PeduliLindungi, hingga Program Kartu Prakerja yang

¹¹ ‘Indonesia Dan Selandia Baru Sepakat Teruskan Kerja Sama Pengembangan Panas Bumi’, *ESDM*
<<https://www.esdm.go.id/en/media->

[center/news-archives/indonesia-dan-selandia-baru-sepakat-teruskan-kerja-sama-pengembangan-panas-bumi](https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/indonesia-dan-selandia-baru-sepakat-teruskan-kerja-sama-pengembangan-panas-bumi) [accessed 24 July 2023].

diimplementasikan secara *end-to-end*.

Urgensi dari transformasi digital juga kian diperkuat dengan tingginya potensi nilai ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan dapat mencapai USD 360 miliar pada tahun 2030. Selain itu, bonus demografi pada penduduk usia produktif yang *digital savvy*, serta jumlah pengguna internet yang terus meningkat setiap tahunnya juga menjadi modal utama Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi digital.

Pengembangan infrastruktur digital menjadi fokus utama Pemerintah untuk menjamin konektivitas internet di seluruh wilayah Indonesia, dengan membangun jaringan fiber optik, perluasan 4G dan pengembangan 5G, dan *Low Earth Orbit Satellite* (LEO) yang sudah diuji coba di Kalimantan Timur. Penciptaan SDM yang memiliki kemampuan digital juga dilakukan Pemerintah dengan melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2023 melalui skema normal, yang akan lebih difokuskan pada pengembangan keahlian, baik *reskilling* maupun *upskilling*, serta peningkatan produktivitas dan kompetensi angkatan kerja.¹²

Untuk mewujudkan percepatan pemulihan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional melalui akselerasi transformasi digital, Pemerintah terus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pihak swasta. Salah satu langkah yang diambil oleh Kemenko Perekonomian adalah dengan melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) bersama PT Microsoft Indonesia tentang Sinergi Penguatan Ekosistem dan Transformasi Ekonomi Digital.

Adapun kemitraan ini merupakan bagian dari “Satu Karya”, sebuah inisiatif terbaru dari Microsoft Indonesia yang mewadahi kolaborasi karya digitalisasi lintas industri di Indonesia, guna mewujudkan satu ekosistem digital yang terintegrasi dan mendukung realisasi potensi ekonomi digital Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Microsoft Indonesia juga meluncurkan dua program komunitas di bawah payung “Satu karya”. Pertama adalah SATU Community, sebuah komunitas bagi setiap individu di Indonesia yang tertarik belajar atau berinovasi menggunakan teknologi Microsoft, di mana mereka dapat saling bertanya dan berbagi pengetahuan maupun keterampilan teknis mengenai teknologi Microsoft, dengan dipandu oleh Microsoft Most Valuable Professional (MVP) dan rekan-rekan komunitas *developer*. Kedua adalah SATU Talenta,

¹² ‘Berperan sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital Didukung Kebijakan yang Adaptif, Agile, dan Forward Looking - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia’

<<https://ekon.go.id/publikasi/detail/4818/berperan-sebagai-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-transformasi-digital-didukung-kebijakan-yang-adaptif-agile-dan-forward-looking>> [accessed 25 July 2023].

komunitas LinkedIn tempat bertemunya talenta-talenta digital Indonesia yang telah memiliki sertifikasi Microsoft dengan para pelaku industri, di mana mereka dapat mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan dunia kerja.¹³

Akselerasi Digital UMKM Indonesia

Dalam pengembangan UMKM digital, salah satu yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah mengajak para inovator muda untuk mendukung program digitalisasi UMKM melalui program Pahlawan Digital UMKM. Program ini bertujuan agar para pelaku UMKM tetap dapat bertahan dengan peningkatan penjualan dengan dukungan ekosistem digital.

Lebih lanjut, Kemenkop UKM memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM melalui empat langkah yaitu : *Pertama*, peningkatan SDM dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat. Dikarenakan kualitas SDM menjadi hal utama bagi pengembangan UMKM di era digitalisasi. *Kedua*, mengintervensi perbaikan proses bisnis pelaku UMKM yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa program. Selain

teknik pemasaran juga diperlukan pengetahuan mengenai pentingnya literasi keuangan bagi para pelaku UMKM.

Ketiga, perluasan akses pasar yang salah satunya mendorong sinergistas antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar para pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Keempat*, mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM. Pahlawan lokal pelaku UMKM ini syaratnya adalah, pemantik pemberdaya, memiliki brand yang kuat, dan secara keseluruhan mampu mengagregasi usaha Mikro dan Kecil untuk berlabuh ke platform digital ataupun ke pasar internasional (ekspor).¹⁴

Dalam pengembangan UMKM berbasis digital, para pelaku UMKM harus dapat bersinergi dengan masyarakat internet (warganet) dengan menampilkan konten-konten kreatif. Melalui sajian konten kreatif secara otomatis dapat menarik perhatian para warganet untuk bisa ikut menyebarkan produknya. Dengan begitu sinergitas ini akan bisa menjadikan produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM akan dikenal luas oleh masyarakat.

¹³ 'Microsoft Indonesia Dan Pos Indonesia Realisasikan Potensi Ekonomi Digital Indonesia Melalui Inisiatif SATU Karya – Indonesia News Center' <<https://news.microsoft.com/id-id/2022/11/10/microsoft-indonesia-dan->

[pos-indonesia-realisasikan-potensi-ekonomi-digital-indonesia-melalui-inisiatif-satu-karya/>](https://news.microsoft.com/id-id/2022/11/10/microsoft-indonesia-dan-) [accessed 20 July 2023].

¹⁴ Bambang Arianto, 'Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Administrasi bisnis*, 6.2 (2020).

Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia

Menko Perekonomian Airlangga Hartato menyatakan manfaat yang akan diperoleh Indonesia saat menjadi Presidensi G20 dapat dilihat dari aspek ekonomi, diantaranya meningkatkan konsumsi domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,4 triliun, pelibatan UMKM serta penyerapan 33 ribu tenaga kerja di berbagai sektor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebutkan manfaat yang akan didapat Indonesia berupa terciptanya lapangan kerja dengan jumlah besar dari 157 pertemuan yang dilakukan. Selain itu, Indonesia dianggap sebagai negara terbesar di ASEAN yang memiliki perekonomian dan sistem politik yang stabil sehingga Indonesia memiliki kesempatan dalam pembuatan kebijakan pemulihan ekonomi.

Manfaat langsung yang dirasakan diantaranya meningkatkan devisa dari kunjungan delegasi ke Indonesia, menghidupkan sektor *hospitality*, mendukung peningkatan konsumsi domestik, mengoptimalkan peran UMKM serta penyerapan tenaga kerja.

Manfaat yang didapatkan dalam bidang politik, sebagai ketua G20, Indonesia dapat mendorong kerjasama dan menginisiasi hasil konkret pada ketiga sektor prioritas, yang strategis bagi pemulihan. Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan kredibilitas oleh dunia dalam memimpin pemulihan

global. Dalam politik luar negeri dan aktivitas diplomasi, kredibilitas adalah modal yang sangat berharga untuk mempermudah dalam menjalin kerja sama di masa mendatang.

Kemudian, dari bidang pembangunan ekonomi dan sosial berkelanjutan, dapat dilihat bahwa manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia ialah menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa '*Indonesia is open for business*'. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai *event* yang menampilkan kemajuan pembangunan Indonesia sekaligus potensi investasi di Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan menjadi Presidensi G20 akan memberikan Indonesia peluang dalam menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah karena berkontribusi bagi sektor pariwisata, akomodasi, transportasi dan ekonomi kreatif serta UMKM lokal.

Kebijakan Negara Tetangga dalam Pemulihan Ekonomi

Singapura

Singapura juga mengambil beberapa langkah kebijakan untuk mengatasi resesi yang terjadi. Singapura merupakan salah satu negara yang dapat memulihkan perekonomian negaranya saat terjadi wabah SARS dan H1N1. Saat itu Singapura dapat memulihkan ekonominya dalam waktu dua tahun saja. Kebijakan pemerintah Singapura dalam menangani kasus Covid-19 terkait kesehatan dapat dikatakan

cukup berhasil, terbukti dari tingkat kematian yang rendah.

Kebijakan Singapura dalam menghadapi resesi ekonomi pada kebijakan fiskal terdiri atas empat paket kebijakan. Paket pertama diumumkan oleh Menteri Keuangan pada 18 Februari 2020. Ditujukan untuk mengurangi dampak Covid-19 kepada para pekerja dan dunia usaha sebanyak 4 miliar dolar Singapura.

Paket kedua diumumkan pada 26 Maret 2020, dengan anggaran sebanyak 48,4 miliar dolar Singapura. Anggaran ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada rumah tangga, membantu agar pekerja tetap dapat bekerja, dan menyediakan dukungan untuk bisnis. Sektor-sektor yang terkena dampak langsung seperti transportasi, pariwisata dan penerbangan diberikan bantuan berupa langkah-langkah untuk menstabilkan perekonomian kembali.

Paket ketiga diumumkan pada 6 April 2020. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang bantuan tambahan sementara hingga *lockdown* mulai dilonggarkan. Bantuan tersebut sebanyak 5,1 miliar dolar Singapura. Paket Keempat diumumkan pada 26 Mei 2020 dengan anggaran sebesar 33 miliar dolar Singapura. Isi dari paket keempat adalah dukungan finansial bagi sektor usaha yang tidak dapat melanjutkan operasionalnya pasca *lockdown*, atau bagi sektor usaha

yang terpukul langsung Covid-19. Selanjutnya memberikan keringanan bagi UMKM dan memberikan potongan retribusi bagi pekerja asing yang bekerja di sektor industri tertentu seperti kelautan, konstruksi dan lepas pantai. Terakhir menambah lapangan pekerjaan sebanyak 40.000 baik pada sektor publik maupun swasta.¹⁵

Vietnam

Vietnam merupakan satu-satunya negara yang mampu mencatatkan zero death COVID-19. Pemerintah Vietnam telah cepat tanggap dalam melakukan kebijakan mitigasi pandemi tersebut. Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, mengeluarkan Dekrit No. 173/QD-TTg yang menyatakan virus Corona sebagai epidemi di Vietnam pada 1 Februari 2020. Pemerintah Vietnam telah membentuk *steering committee* Nasional yang diketuai Wakil PMVu Duc Dam dan *steering committee* tingkat daerah yang dipimpin Kepala Komite Rakyat di berbagai tingkatan. Kementerian Kesehatan telah membentuk 25 tim reaksi cepat, Kementerian Pertahanan membentuk 20 tim reaksi cepat, serta 21 RS sipil dan 4 RS militer telah disiagakan untuk koordinasi penanganan secara nasional.

¹⁵ Shanti Darmastuti and others, 'COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura', *Jurnal Madani: Ilmu*

Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, 4.1 (2021)
<<https://doi.org/10.33753/madani.v4i1.148>>.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Indonesia dalam mendukung pencapaian isu prioritas G20 dalam memperbaiki perekonomian pasca Covid-19. Unsur Hubungan Internasional dalam penelitian ini adalah dilakukannya pertemuan rutin tahunan antar anggota G20 untuk berdiskusi dan melakukan kolaborasi dalam mencari solusi terhadap permasalahan yang telah terjadi sekarang.

Beberapa masalah perekonomian nasional maupun internasional muncul selama masa pandemi COVID-19 seperti meningkatnya jumlah pengangguran, melemahnya sektor pariwisata terutama pada negara berkembang, dan menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengatasi masalah ekonomi, Indonesia sebagai Presidensi G20 pada tahun 2022 fokus pada 3 pilar penting, yaitu memperkuat arsitektur kesehatan global, transisi energi, dan transformasi digital.

Fokus utama dalam penulisan ini adalah bagaimana kebijakan Indonesia mendukung G20 dalam mencapai isu prioritas dalam memperbaiki ekonomi. Ada beberapa capaian agenda prioritas G20 Indonesia yaitu pada bidang kesehatan, G20 telah berhasil membentuk Dana Pandemi (*Pandemic Fund*) yang merupakan kemitraan kolaboratif antara negara pendonor, negara penerima, swasta,

dan lembaga lainnya. Lalu pada bidang transisi energi, Indonesia berhasil membentuk *Bali Energy Transition Roadmap* country platform yang berisi kerangka kerja untuk mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, adil, terjangkau, dan inklusif. Ada tiga prioritas dalam kerangka kerja *Bali Energy Transition Roadmap* yaitu mengamankan aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi yang cerdas dan bersih, serta memajukan pembiayaan energi bersih.

Dan pada bidang transformasi digital, G20 merumuskan strategi dan inisiasi untuk mendukung partisipasi kelompok rentan dalam ekonomi digital. Beberapa kebijakan dan kerangka kerja yang telah dirumuskan dan disetujui oleh anggota G20 selama masa Presidensi Indonesia dan telah melalui beberapa pertemuan diharapkan dapat diimplementasikan oleh semua negara anggota maupun negara non-anggota agar dapat mengatasi berbagai permasalahan didalam negerinya. Dan diharapkan juga agar semua negara semakin erat dalam melakukan kerjasama dalam bidang apapun dan selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak ataupun lembaga untuk mewujudkan dunia yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adler, Emanuel, and Michael Faubert, 'Epistemic Communities of Practice', in *Conceptualizing International*

Practices, ed. by Alena Drieschova, Christian Bueger, and Ted Hopf, 1st edn (Cambridge University Press, 2022), pp. 47–76
<<https://doi.org/10.1017/9781009052504.003>>

Vinsensio Dugis, ed., *Teori Hubungan Internasional* (Cakra Studi Global Strategis)

Dokumen :

‘Aksi Nyata Presidensi G20 Indonesia’, *Warta Fiskal*, 4 (2022)

‘Indonesia Luncurkan ETM Country Platform Untuk Mempercepat Transisi Energi Yang Adil Dan Terjangkau’ (presented at the Siaran Pers, Bali, 2022)

Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional Badan Pengkajian dan Pengembangan, ‘Analisis Pemanfaatan Presidensi G20 Indonesia Pada Tahun 2023 Di Sektor Perdagangan’, 2020

Jurnal :

Arianto, Bambang, ‘Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19’, *Jurnal Administrasi bisnis*, 6.2 (2020)

Darmastuti, Shanti, Mansur Juned, Fauzan Anggoro Susanto, and Rachmasari Nur Al-Husin, ‘COVID-19 dan Kebijakan dalam Menyikapi Resesi Ekonomi: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Singapura’, *Jurnal Madani:*

Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora, 4.1 (2021)
<<https://doi.org/10.33753/madani.v4i1.148>>

Hardiansyah, Raja, and Rona Tanjung, ‘DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEREKONOMIAN KEPULAUAN RIAU’, 8.1 (2021)

Olivia, Yessi, ‘Level Analisis Sistem Dan Teori Hubungan Internasional’, 3 (2013)

Website :

‘Berperan sebagai Akselerator Pertumbuhan Ekonomi, Transformasi Digital Didukung Kebijakan yang Adaptif, Agile, dan Forward Looking - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia’
<<https://ekon.go.id/publikasi/detail/4818/berperan-sebagai-akselerator-pertumbuhan-ekonomi-transformasi-digital-didukung-kebijakan-yang-adaptif-agile-dan-forward-looking>> [accessed 25 July 2023]

‘East Asia and Pacific Sustaining Growth, Restraining Inflation, but Facing Risks Ahead’, *World Bank*
<<https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2022/09/26/east-asia-and-pacific-sustaining-growth-restraining-inflation>>

but-facing-risks-ahead>
[accessed 25 May 2023]

Edi Cahyono, sugiarto, 'Presidensi G20 Pemulihan Ekonomi Dan Indonesia Maju | Sekretariat Negara'

<https://www.setneg.go.id/baca/index/presidensi_g20_pemulihan_ekonomi_dan_indonesia_maju> [accessed 29 March 2023]

'Indonesia Dan Selandia Baru Sepakat Teruskan Kerja Sama Pengembangan Panas Bumi', *ESDM*

<<https://www.esdm.go.id/en/media-center/news-archives/indonesia-dan-selandia-baru-sepakat-teruskan-kerja-sama-pengembangan-panas-bumi>>
[accessed 24 July 2023]

'Microsoft Indonesia Dan Pos Indonesia Realisasikan Potensi Ekonomi Digital Indonesia Melalui Inisiatif SATU Karya – Indonesia News Center'

<<https://news.microsoft.com/id-id/2022/11/10/microsoft-indonesia-dan-pos-indonesia-realisasikan-potensi-ekonomi-digital-indonesia-melalui-inisiatif-satu-karya/>>
[accessed 20 July 2023]

'World Economic Outlook', *IMF*
<<https://www.imf.org/en/Publications/WEO>> [accessed 25 May 2023]